



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MOHAMMAD IDROES

NIK : 5171010303570002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Jabatan : KETUA

Jenis Laporan : Periodik - 2020

Tanggal Kirim : 30 Januari 2021

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD IDROES**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **20410**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.978.159.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/57 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 664.704.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/160 m2 di KOTA SURABAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 812.500.000
3. Tanah Seluas 229 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp.
729.750.000
4. Tanah Seluas 179 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp.
492.325.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/218 m2 di BLITAR, WARISAN
Rp. 278.880.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HADIAH
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 110.655.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 386.985.495

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.480.799.495

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.480.799.495

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.